COMMUNITY
Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5, No. 3 November 2025, Hal. 198-206

Penguatan Kesadaran Hukum dan Literasi Politik Generasi Muda dalam Menghadapi Informasi Politik di Media Digital

Althea Serafim Krsiwandaru*[1], Berliant Pratiwi[2], Dian Karisma[3], Antonius Juniadhi Soekandar[3], Dyah Ayu Kusumaningrum[3]
[1,2,3] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Vokasi, Universitas Sains dan Teknologi Komputer
[4,5] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Vokasi, Universitas Sains dan Teknologi Komputer
*e-mail: althea@stekom.ac.id [1]

Abstrak

Perkembangan media digital telah meningkatkan akses generasi muda terhadap informasi politik, tetapi juga menghadirkan risiko penyebaran misinformasi, disinformasi, dan rendahnya kemampuan dalam memverifikasi informasi politik. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan kesadaran hukum dan literasi politik agar generasi muda mampu memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara serta menyikapi informasi politik secara kritis dan bertanggung jawab. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum, literasi politik, dan kemampuan generasi muda dalam menghadapi informasi politik di media digital. Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dengan melibatkan 30 peserta berusia 17–25 tahun. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif-edukatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, praktik identifikasi dan verifikasi informasi politik, serta evaluasi menggunakan pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan skor rata-rata pemahaman peserta dari 56,33 pada pre-test menjadi 83,83 pada post-test, atau meningkat sebesar 48,83%. Peningkatan juga terlihat pada kemampuan verifikasi informasi, pemahaman hak dan kewajiban politik, serta sikap dalam menghargai perbedaan pandangan politik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa edukasi yang dipadukan dengan praktik literasi digital efektif dalam memperkuat kapasitas generasi muda. Kegiatan ini penting sebagai upaya membentuk generasi muda yang sadar hukum, melek politik, kritis terhadap informasi, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis.

Kata kunci: *Kesadaran Hukum, Literasi Politik, Generasi Muda, Media Digital, Pendidikan Politik*

Abstract

The development of digital media has increased young people's access to political information while also creating risks related to misinformation, disinformation, and limited ability to verify political information. This condition underscores the importance of enhancing legal awareness and political literacy, enabling young people to comprehend their rights and responsibilities as citizens and critically and responsibly engage with political information. This community service activity aimed to improve legal awareness, political literacy, and the ability of young people to deal with political information in digital media. The activity was conducted in Karanganyar Regency, Central Java, involving 30 participants aged 17–25 years. A participatory-educational approach was implemented through interactive lectures, discussions, case studies, practical identification and verification of political information, and evaluation using pre-tests and post-tests. The results showed an increase in participants' average understanding score from 56.33 in the pre-test to 83.83 in the post-test, representing an improvement of 48.83%. Improvements were also observed in information verification skills, understanding of political rights and obligations, and attitudes toward differences in political views. These findings indicate that education combined with digital literacy practices is effective in strengthening young people's capacity. This activity is important for developing a legally aware, politically literate, critical, and responsible young generation in a democratic society.
Keywords: Legal Awareness, Political Literacy, Young Generation, Digital Media, Political Education

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara generasi muda memperoleh, memahami, menyebarkan, dan merespons informasi politik [1]. Media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan hiburan, tetapi telah berkembang menjadi ruang publik digital tempat masyarakat, khususnya generasi muda, memperoleh informasi mengenai kebijakan pemerintah, tokoh politik, pemilihan umum, serta berbagai isu kewarganegaraan [2]. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi peningkatan partisipasi politik, tetapi pada saat yang sama menimbulkan tantangan berupa penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, misinformasi,

disinformasi, propaganda, ujaran kebencian, dan pembentukan opini politik berdasarkan informasi yang tidak akurat [3]. Urgensi literasi politik semakin besar karena generasi muda merupakan kelompok yang sangat aktif menggunakan media digital [4]. Penelitian [5],[6] Generasi Z menjadi salah satu kelompok yang dominan dalam penggunaan internet dan media sosial sekaligus menjadi sasaran berbagai informasi dan isu politik di ruang digital. Hasil kegiatan sosialisasi terhadap 100 siswa di SMA Negeri 1 Bolangitang Timur menunjukkan bahwa pendidikan literasi politik dapat meningkatkan pengetahuan politik serta sikap generasi muda dalam menggunakan media sosial untuk mengekspresikan pandangan politiknya [7].

Permasalahan tersebut juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam mengevaluasi informasi digital. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) menunjukkan adanya peningkatan kemampuan digital masyarakat Indonesia, tetapi peningkatan kemampuan menggunakan teknologi belum secara otomatis berarti bahwa masyarakat memiliki kemampuan yang memadai dalam menilai kualitas dan kebenaran informasi [8]. IMDI nasional meningkat dari 37,80 pada 2022 menjadi 43,18 pada 2023 dan 43,34 pada 2024. Pada 2025, skor nasional kembali meningkat menjadi 44,53. Jawa Barat pada 2025 memperoleh skor 52,05 dan termasuk provinsi dengan capaian tertinggi [9] . Data tersebut menunjukkan adanya perkembangan kapasitas digital, tetapi penguatan kecakapan kritis dalam mengonsumsi informasi, termasuk informasi politik, tetap diperlukan.

Dalam konteks politik, persoalan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membedakan informasi benar dan salah, tetapi juga menyangkut kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara [10]. Literasi politik yang baik diperlukan agar generasi muda mampu memahami proses demokrasi, hak memilih dan dipilih, fungsi lembaga negara, kebijakan publik, serta mekanisme partisipasi politik secara bertanggung jawab [11], [12]. Dengan demikian, literasi politik memiliki keterkaitan erat dengan kesadaran hukum karena aktivitas politik masyarakat berlangsung dalam kerangka konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Penelitian mengenai penggunaan media sosial dan literasi politik mahasiswa menunjukkan bahwa media sosial berkontribusi terhadap perkembangan melek politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi politik mahasiswa PPKn Untirta berada pada persentase 67% dan berpengaruh positif serta signifikan terhadap partisipasi politik mahasiswa. Selain itu, informasi hoaks juga berpengaruh terhadap partisipasi politik mahasiswa, dan kedua variabel tersebut secara simultan berpengaruh signifikan terhadap partisipasi politik [13]. Temuan ini menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi instrumen pendidikan politik apabila digunakan secara kritis dan bertanggung jawab.

Permasalahan literasi politik juga semakin kompleks karena bentuk informasi politik di media sosial berkembang secara cepat dan semakin beragam. Penelitian terhadap 400 pemilih pemula di Jabodetabek menemukan bahwa terpaan meme politik, kualitas informasi, dan literasi digital berpengaruh terhadap perubahan sikap pemilih pemula [14]. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa bentuk informasi politik yang sederhana, visual, dan mudah dibagikan dapat memengaruhi sikap generasi muda, sehingga kemampuan mengevaluasi informasi menjadi bagian penting dari pendidikan politik di era digital.

Temuan yang lebih baru juga menunjukkan pentingnya literasi digital kritis dalam memahami informasi politik di media sosial. Penelitian mengenai paparan konten #KaburAjaDulu di media sosial menunjukkan adanya hubungan antara intensitas paparan media sosial dengan kesadaran sosial dan kepercayaan politik [15]. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa tingginya paparan informasi perlu diimbangi dengan literasi digital yang kritis agar informasi politik tidak diterima secara langsung tanpa proses evaluasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan sasaran 30 orang generasi muda berusia 17–25 tahun di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Berdasarkan identifikasi awal melalui observasi dan komunikasi dengan calon peserta, diketahui bahwa 90% peserta menggunakan media sosial setiap hari, 83,3% memperoleh informasi politik melalui media sosial, 70% belum terbiasa melakukan verifikasi sumber informasi politik, dan 66,7% belum memahami secara optimal hak dan kewajiban politik sebagai warga negara. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tingginya akses

generasi muda terhadap informasi politik dan kemampuan mereka untuk memahami, memverifikasi, serta menyikapi informasi tersebut secara kritis dan bertanggung jawab. Tingginya penggunaan media sosial di kalangan peserta menjadi peluang sekaligus tantangan dalam penguatan literasi politik, karena informasi politik dapat diperoleh dengan cepat, tetapi tidak semua informasi yang beredar memiliki sumber dan substansi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari aspek wilayah, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, memiliki potensi sosial yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Keberadaan karang taruna, organisasi kepemudaan, komunitas pemuda, lembaga pendidikan, serta kelompok masyarakat menjadi modal sosial yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan edukasi politik. Generasi muda di wilayah tersebut juga memiliki akses yang relatif mudah terhadap telepon pintar dan media sosial, sehingga memungkinkan pelaksanaan edukasi politik berbasis digital secara partisipatif.

Permasalahan utama yang ditemukan adalah (1) belum optimalnya pemahaman generasi muda mengenai konsep dasar literasi politik dan hak konstitusional warga negara; (2) masih terbatasnya kemampuan dalam mengidentifikasi informasi politik yang valid dan tidak valid; (3) adanya kecenderungan menerima dan menyebarkan informasi politik dari media sosial tanpa melakukan verifikasi; serta (4) belum optimalnya kesadaran untuk menggunakan media digital sebagai sarana partisipasi politik yang kritis, etis, dan bertanggung jawab. Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya intervensi melalui kegiatan pengabdian yang mengintegrasikan pendidikan hukum, pendidikan politik, dan literasi digital.

Berdasarkan kajian tersebut, kegiatan pengabdian ini memiliki posisi sebagai bentuk hilirisasi pengetahuan hukum dan pendidikan politik ke dalam praktik pemberdayaan masyarakat. Kebaruan kegiatan terletak pada integrasi antara kesadaran hukum, literasi politik, dan kemampuan menghadapi informasi politik di media digital. Pendekatan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta mengenai politik, tetapi juga membentuk kemampuan praktis dalam memeriksa informasi, mengenali informasi yang menyesatkan, memahami hak dan kewajiban politik, serta menyampaikan pendapat politik secara etis dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum generasi muda mengenai hak dan kewajiban politik sebagai warga negara, meningkatkan kemampuan literasi politik dalam memahami proses demokrasi dan partisipasi politik, serta meningkatkan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi, memverifikasi, dan menyikapi informasi politik di media digital secara kritis dan bertanggung jawab. Keberhasilan kegiatan akan diukur melalui perbandingan hasil pre-test dan post-test, sehingga perubahan tingkat pemahaman peserta dapat diketahui secara kuantitatif.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif-edukatif yang mengintegrasikan pendidikan hukum, literasi politik, dan literasi digital. Kegiatan dilaksanakan di Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dengan melibatkan Karang Taruna Desa Papahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan. Mitra merupakan organisasi kepemudaan yang memiliki keterkaitan dengan pembinaan dan pemberdayaan generasi muda di lingkungan masyarakat setempat. Sasaran kegiatan berjumlah 30 orang generasi muda berusia 17–25 tahun. Pelaksanaan kegiatan berlangsung pada 15 Agustus 2026 dengan durasi 6 jam dalam 1 hari kegiatan.

Pelibatan mitra dalam program dilakukan mulai dari tahap identifikasi kebutuhan hingga evaluasi kegiatan. Pada awalnya, mitra membantu dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapi generasi muda, terutama terkait pemahaman hukum, partisipasi politik, dan penggunaan media sosial untuk mendapatkan serta menyebarkan informasi politik. Mereka juga berperan dalam mengomunikasikan kebutuhan peserta, mengoordinasikan calon peserta, menentukan teknis

pelaksanaan, dan mendukung penyediaan fasilitas. Selama pelaksanaan edukasi, mitra berfungsi sebagai penghubung antara tim pengabdian dan peserta, membantu mengatur diskusi, serta mendorong keterlibatan aktif peserta dalam praktik dan simulasi. Dengan demikian, mitra tidak hanya menyediakan peserta, tetapi juga berkontribusi dalam proses identifikasi masalah dan pelaksanaan program.

Metode penerapan kegiatan dilaksanakan melalui enam tahapan utama, yaitu identifikasi dan analisis kebutuhan, persiapan kegiatan, pelaksanaan edukasi dan pelatihan, praktik literasi politik di media digital, evaluasi dan pengukuran keberhasilan, serta penentuan indikator ketercapaian kegiatan. Pada tahap pertama, identifikasi dan analisis kebutuhan dilakukan melalui observasi, komunikasi dengan kelompok sasaran, dan pemberian pre-test untuk mengetahui tingkat awal pemahaman peserta mengenai kesadaran hukum, hak dan kewajiban politik warga negara, demokrasi, serta kemampuan dalam mengidentifikasi dan memverifikasi informasi politik di media digital. Dalam tahapan ini, informasi dari mitra mencakup karakteristik peserta, kebiasaan penggunaan media sosial, dan permasalahan yang sering dihadapi oleh generasi muda terkait penerimaan serta penyebaran informasi politik. Data yang diberikan menjadi dasar untuk merumuskan materi edukasi dan contoh kasus yang relevan dengan kondisi peserta.

Tahap kedua adalah persiapan kegiatan yang meliputi penyusunan materi, instrumen evaluasi, media pembelajaran, serta studi kasus yang relevan dengan permasalahan informasi politik di media sosial. Materi mencakup literasi politik, hak dan kewajiban warga negara, prinsip demokrasi, kesadaran hukum, identifikasi hoaks, misinformasi dan disinformasi, teknik verifikasi informasi, serta etika menyampaikan pendapat politik di media digital. Mitra berperan dalam koordinasi teknis, penyesuaian waktu dan tempat pelaksanaan, serta penyampaian informasi kepada peserta untuk memastikan kegiatan berlangsung sesuai dengan kondisi lingkungan setempat.

Tahap ketiga dilakukan melalui edukasi dan pelatihan dengan metode ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, dan studi kasus. Peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya kesadaran hukum dan literasi politik dalam kehidupan demokratis serta diarahkan untuk memahami konsekuensi dari menerima dan menyebarkan informasi politik tanpa melakukan verifikasi. Dalam tahapan ini, mitra membantu mengondisikan peserta dan mendorong partisipasi aktif selama penyampaian materi maupun diskusi.

Tahap keempat berupa praktik literasi politik di media digital, yaitu peserta diberikan contoh informasi politik yang diperoleh dari media sosial, kemudian diminta memeriksa sumber, tanggal publikasi, isi informasi, membandingkannya dengan sumber lain, serta menentukan apakah informasi tersebut dapat dipercaya atau perlu diragukan. Peserta juga melakukan simulasi penyampaian pendapat politik secara bertanggung jawab dengan memperhatikan etika komunikasi, penghormatan terhadap perbedaan pandangan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Mitra membantu mendukung pelaksanaan praktik dan diskusi kelompok, sedangkan tim pengabdian memberikan pendampingan serta penilaian terhadap kemampuan peserta dalam menyelesaikan studi kasus.

Tahap kelima adalah evaluasi dan pengukuran keberhasilan yang dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Pengukuran kuantitatif dilakukan melalui perbandingan hasil pre-test dan post-test menggunakan instrumen kuesioner skala Likert 1–5 yang mengukur aspek kesadaran hukum, literasi politik, literasi digital, sikap politik, etika digital, dan partisipasi politik. Persentase peningkatan dihitung dengan rumus: ((Skor Post-test − Skor Pre-test) / Skor Pre-test) × 100%. Sementara itu, evaluasi kualitatif dilakukan melalui observasi, diskusi, tanya jawab, dan penilaian terhadap kemampuan peserta dalam menyelesaikan studi kasus. Mitra turut memberikan masukan mengenai respons peserta selama kegiatan dan menilai relevansi materi dengan kebutuhan generasi muda di lingkungan komunitas.

Tahap keenam adalah penentuan tingkat ketercapaian kegiatan berdasarkan perubahan pengetahuan, sikap, kemampuan praktik, dan partisipasi peserta. Kegiatan dikategorikan berhasil apabila terdapat peningkatan skor post-test dibandingkan dengan pre-test, disertai perubahan sikap yang ditunjukkan melalui kemampuan peserta bersikap lebih kritis terhadap informasi

politik, menghargai perbedaan pilihan dan pendapat, serta tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Dari aspek sosial budaya, keberhasilan kegiatan ditunjukkan melalui meningkatnya kesadaran untuk membangun komunikasi politik yang sehat dan menghindari konflik akibat informasi yang tidak benar. Aspek ekonomi tidak menjadi indikator utama karena kegiatan berfokus pada hukum dan literasi politik, tetapi peningkatan kemampuan literasi digital diharapkan memberikan manfaat tidak langsung dalam penggunaan teknologi secara produktif dan bertanggung jawab. Keterlibatan mitra dalam kegiatan juga diharapkan dapat mendukung keberlanjutan penyebaran pengetahuan kepada generasi muda lainnya setelah program pengabdian selesai dilaksanakan. Dengan demikian, metode penerapan kegiatan tidak hanya mengukur peningkatan pengetahuan peserta, tetapi juga mengukur perubahan sikap dan kemampuan praktis generasi muda dalam memahami, mengevaluasi, dan menyikapi informasi politik di media digital secara kritis, etis, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta demokrasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dengan sasaran sebanyak 30 orang generasi muda berusia 17–25 tahun. Kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif-edukatif yang menggabungkan penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, praktik verifikasi informasi politik, dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pengukuran kemampuan awal peserta melalui pre-test. Selanjutnya, peserta memperoleh materi mengenai kesadaran hukum, hak dan kewajiban warga negara, prinsip demokrasi, literasi politik, karakteristik informasi politik di media digital, misinformasi dan disinformasi, teknik verifikasi informasi, serta etika dalam menyampaikan pendapat politik di media sosial.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan studi kasus untuk menghubungkan materi dengan situasi yang dihadapi peserta dalam kehidupan sehari-hari. Peserta diberikan contoh informasi politik yang beredar di media digital dan diarahkan untuk mengidentifikasi sumber informasi, memeriksa tanggal publikasi, membandingkan informasi dengan sumber lain, serta menentukan tingkat kredibilitas informasi tersebut. Melalui kegiatan tersebut, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga memperoleh pengalaman praktis dalam menerapkan literasi politik dan literasi digital.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Tahapan	**Bentuk Kegiatan**	**Luaran**
Identifikasi	Observasi dan *pre-test*	Data kemampuan awal peserta
Persiapan	Penyusunan materi dan studi kasus	Modul/materi edukasi
Edukasi	Ceramah interaktif dan diskusi	Peningkatan pengetahuan
Praktik	Identifikasi dan verifikasi informasi politik	Peningkatan keterampilan
Simulasi	Analisis kasus dan penyampaian pendapat	Perubahan sikap
Evaluasi	*Post-test* dan observasi	Data ketercapaian kegiatan

3.2 Peningkatan Kesadaran Hukum dan Literasi Politik Peserta

Hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan tingkat pemahaman peserta setelah diberikan edukasi. Pengukuran dilakukan menggunakan instrumen pre-test dan post-test yang mencakup enam aspek, yaitu kesadaran hukum, literasi politik, literasi digital, kemampuan verifikasi informasi, etika bermedia digital, dan partisipasi politik. Setiap aspek dinilai menggunakan skala 1–5. Instrumen pre-test dan post-test terdiri dari kuesioner dengan 30 butir pernyataan, di mana masing-masing aspek penilaian diwakili oleh lima pernyataan. Instrumen ini digunakan untuk mengukur perubahan tingkat pemahaman peserta terkait kesadaran hukum, literasi politik, literasi digital, kemampuan verifikasi informasi, etika bermedia digital, dan

partisipasi politik, sebelum dan setelah kegiatan. Penilaian setiap pernyataan menggunakan skala Likert 1-5, di mana skor 1 menunjukkan pemahaman terendah dan skor 5 menunjukkan pemahaman tertinggi. Hasil pengukuran kemudian dikonversi ke dalam skala 0–100 untuk memudahkan interpretasi. Konversi dilakukan dengan membandingkan skor aktual peserta dengan skor maksimal yang dapat dicapai, lalu dikalikan 100.

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$$

Dengan jumlah 30 butir pernyataan dan skor maksimal 5 pada setiap butir, skor maksimal keseluruhan adalah 150. Sebagai contoh, apabila peserta memperoleh skor aktual 85, nilai hasil konversinya adalah 56,67. Perhitungan rata-rata nilai pre-test dan post-test dilakukan berdasarkan hasil konversi seluruh peserta. Dengan demikian, kedua hasil pengukuran dapat dibandingkan menggunakan rentang nilai yang sama. Berdasarkan Tabel 2, rata-rata skor peserta meningkat dari 56,33 pada saat pre-test menjadi 83,83 pada saat post-test. Dengan demikian, terjadi peningkatan rata-rata sebesar 48,83%. Peningkatan terbesar terdapat pada aspek kemampuan verifikasi informasi, yaitu sebesar 60,78%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa praktik langsung dalam mengidentifikasi dan memeriksa informasi politik memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemampuan peserta.

Tabel 2. Hasil Pengukuran Pre-test dan Post-test

Aspek Penilaian	**Pre-test**	**Post-test**	**Peningkatan**
Kesadaran hukum	58,0	84,0	44,83%
Literasi politik	55,0	83,0	50,91%
Literasi digital	57,0	86,0	50,88%
Verifikasi informasi	51,0	82,0	60,78%
Etika bermedia digital	61,0	87,0	42,62%
Partisipasi politik	56,0	81,0	44,64%
Rata-rata	**56,33**	**83,83**	**48,83%**

Peningkatan juga terjadi pada aspek literasi politik dan literasi digital. Peserta menjadi lebih memahami bahwa informasi politik yang diperoleh melalui media sosial tidak dapat langsung diterima sebagai fakta tanpa melakukan pemeriksaan terhadap sumber dan konteks informasi. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan pengabdian tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga memberikan keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Persentase peningkatan yang tertera pada Tabel 2 dihitung dengan rumus peningkatan relatif, yang melibatkan selisih antara nilai post-test dan pre-test dibagi dengan nilai pre-test, kemudian dikalikan 100%. Hasil ini mencerminkan peningkatan skor pemahaman peserta setelah pelatihan, dan bukan representasi dari persentase perubahan perilaku yang sesungguhnya dalam jangka panjang.

3.3 Perubahan Sikap dan Perilaku Generasi Muda

Perubahan peserta tidak hanya terlihat dari peningkatan skor pengetahuan, tetapi juga dari hasil observasi selama proses kegiatan. Pada awal kegiatan, sebagian peserta cenderung menerima informasi politik berdasarkan judul atau sumber yang pertama kali ditemukan di media sosial. Setelah memperoleh materi dan melakukan praktik verifikasi, peserta mulai menunjukkan sikap lebih kritis dengan mempertanyakan sumber, waktu publikasi, konteks, dan kebenaran informasi sebelum mempercayai atau membagikannya.

Perubahan sikap peserta terlihat dari hasil pengamatan selama kegiatan, seperti yang dijelaskan dalam Tabel 3. Persentase sebelum kegiatan menunjukkan kondisi awal, sedangkan persentase setelah kegiatan mencerminkan peserta yang memenuhi indikator sikap selama diskusi, simulasi, dan praktik verifikasi informasi. Persentase dihitung dengan membandingkan jumlah peserta yang memenuhi indikator dari total 30 peserta, di mana setiap peserta mewakili sekitar 3,33% dari total.

Peserta menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam menyampaikan pendapat dan memberikan argumentasi berdasarkan informasi yang tersedia. Peserta juga diarahkan untuk memahami bahwa perbedaan pilihan politik merupakan bagian dari kehidupan demokratis sehingga tidak seharusnya menjadi alasan untuk melakukan penghinaan, penyebaran informasi palsu, atau konflik antarkelompok.

Tabel 3. Perubahan Sikap Peserta Kegiatan

Indikator Perubahan Sikap	**Sebelum Kegiatan**	**Setelah Kegiatan**
Memeriksa sumber sebelum membagikan informasi	30,0%	83,3%
Membandingkan informasi dengan sumber lain	26,7%	80,0%
Memahami hak dan kewajiban politik	40,0%	86,7%
Menghargai perbedaan pilihan politik	63,3%	90,0%
Menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi	36,7%	86,7%

Data menunjukkan peningkatan jumlah peserta dengan indikator sikap positif selama kegiatan. Kemampuan memeriksa sumber sebelum berbagi informasi meningkat dari 30,0% menjadi 83,3%, dan membandingkan informasi dengan sumber lain dari 26,7% menjadi 80,0%. Namun, hasil ini tidak dapat diartikan sebagai perubahan kebiasaan permanen dalam penggunaan media digital, karena evaluasi dilakukan hanya dalam masa kegiatan tanpa pemantauan lanjutan terhadap perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, hasil Tabel 3 sebaiknya dipahami sebagai indikasi perubahan sikap dan kemampuan peserta selama proses edukasi dan simulasi. Hal ini menjadi salah satu luaran penting karena tujuan kegiatan tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi diarahkan pada perubahan perilaku dalam menggunakan media digital.

3.4 Tingkat Ketercapaian Tujuan Kegiatan

Ketercapaian tujuan kegiatan diukur berdasarkan tiga indikator utama, yaitu peningkatan pengetahuan, perubahan sikap, dan peningkatan kemampuan praktis dalam Tabel 4. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, terjadi peningkatan rata-rata pemahaman peserta sebesar 48,83%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, peningkatan tersebut termasuk dalam kategori tinggi.

Penilaian kemampuan verifikasi informasi dilakukan melalui praktik identifikasi dan pemeriksaan informasi politik, di mana peserta diberikan studi kasus untuk dianalisis. Evaluasi peserta didasarkan pada lima indikator utama: (1) kemampuan mengidentifikasi sumber informasi, (2) memeriksa tanggal publikasi, (3) membandingkan informasi dengan sumber lain, (4) mengenali kesesuaian konteks informasi, dan (5) menentukan kredibilitas informasi. Masing-masing indikator dinilai lewat keberhasilan peserta dalam menyelesaikan tugas praktik yang diberikan.

Tabel 4. Indikator Ketercapaian Kegiatan

Indikator	**Target**	**Hasil**	**Keterangan**
Peningkatan pengetahuan	≥20%	48,83%	Tercapai
Kemampuan verifikasi informasi	≥70% peserta	83,3%	Tercapai
Pemahaman hak dan kewajiban politik	≥70% peserta	86,7%	Tercapai
Penghargaan terhadap perbedaan politik	≥70% peserta	90,0%	Tercapai
Partisipasi aktif dalam diskusi	≥70% peserta	86,7%	Tercapai

Peserta dianggap memenuhi kriteria jika mampu mencapai sekurang-kurangnya empat dari lima indikator tersebut. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa persentase kemampuan peserta dalam verifikasi informasi mencapai 83,3%, dengan 25 dari 30 peserta memenuhi kriteria praktik yang ditetapkan. Meski demikian, kriteria keberhasilan ini tidak menjamin bahwa semua peserta memiliki kemampuan verifikasi informasi yang sempurna; sebaliknya, mereka digunakan untuk menilai ketercapaian target dari kegiatan yang dilaksanakan. Kemampuan praktis peserta juga terlihat dari hasil studi kasus. Sebelum pelatihan, sebagian peserta mengalami kesulitan dalam menentukan kredibilitas informasi politik. Setelah pelatihan, peserta mampu menerapkan

langkah-langkah sederhana untuk memeriksa informasi, seperti memeriksa sumber, membandingkan informasi, dan mempertimbangkan konteks sebelum mengambil kesimpulan.

Dengan demikian, berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, seluruh target utama kegiatan dapat dinyatakan tercapai. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan edukasi yang dipadukan dengan diskusi dan praktik studi kasus sesuai dengan kebutuhan generasi muda dalam menghadapi informasi politik di media digital. Namun, capaian harus diinterpretasikan sesuai ruang lingkup evaluasi. Peningkatan skor pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan pemahaman, tetapi hasil observasi dan simulasi belum membuktikan perubahan perilaku yang bertahan lama. Diperlukan evaluasi lanjutan untuk menilai konsistensi penerapan literasi politik dan digital setelah kegiatan berakhir.

3.5 Keunggulan dan Kelemahan Kegiatan

Keunggulan utama kegiatan terletak pada pendekatan yang tidak hanya memberikan materi mengenai hukum dan politik, tetapi juga mengintegrasikannya dengan persoalan yang dihadapi peserta dalam penggunaan media digital. Materi menjadi lebih kontekstual karena peserta langsung mempraktikkan cara mengidentifikasi dan memverifikasi informasi politik. Penggunaan studi kasus juga mendorong peserta untuk aktif berdiskusi dan menyampaikan pendapat, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih partisipatif.

Meskipun demikian, kegiatan memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, jumlah peserta masih terbatas sehingga hasil kegiatan belum dapat digeneralisasikan kepada seluruh generasi muda di Kabupaten Karanganyar. Kedua, pengukuran perubahan perilaku dilakukan dalam waktu relatif singkat sehingga belum dapat menggambarkan perubahan perilaku peserta dalam jangka panjang. Ketiga, kegiatan masih bergantung pada ketersediaan perangkat digital dan akses internet peserta ketika melakukan praktik verifikasi informasi.

Penggunaan instrumen pre-test dan post-test yang sama mengakibatkan efek pengulangan, karena peserta sudah mengenal bentuk pertanyaan sebelum evaluasi akhir. Metode pengukuran melalui observasi dan simulasi juga memiliki batasan, hanya mencerminkan kemampuan peserta dalam situasi tertentu. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan evaluasi tindak lanjut *(follow-up evaluation*) satu hingga tiga bulan setelah pelatihan, guna menilai penerapan keterampilan verifikasi informasi dan etika bermedia digital dalam kehidupan sehari-hari peserta.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Penguatan Kesadaran Hukum dan Literasi Politik Generasi Muda dalam Menghadapi Informasi Politik di Media Digital” telah terlaksana dengan baik dan memberikan peningkatan terhadap pengetahuan, sikap, serta keterampilan peserta dalam memahami isu hukum dan politik di ruang digital. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata pemahaman peserta meningkat dari 56,33 pada pre-test menjadi 83,83 pada post-test, atau mengalami peningkatan sebesar 48,83%. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa metode edukasi yang dipadukan dengan diskusi, studi kasus, dan praktik verifikasi informasi efektif dalam membantu generasi muda memahami hak dan kewajiban politik, prinsip demokrasi, serta cara menyikapi informasi politik secara kritis dan bertanggung jawab.

Kelebihan kegiatan terletak pada pendekatan yang partisipatif dan kontekstual karena peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga melakukan praktik identifikasi dan verifikasi informasi politik yang ditemukan di media digital. Namun demikian, kegiatan masih memiliki keterbatasan berupa jumlah peserta yang relatif terbatas, waktu pelaksanaan yang singkat, dan belum adanya pengukuran perilaku peserta dalam jangka panjang, sehingga dampak berkelanjutan belum dapat diketahui secara optimal. Pengembangan selanjutnya dapat dilakukan melalui program literasi politik digital secara berkelanjutan dengan melibatkan sekolah, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, dan pemerintah daerah, serta mengembangkan modul

digital, pelatihan fact-checking, dan komunitas literasi politik. Dengan pengembangan tersebut, kegiatan diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman individu, tetapi juga membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran hukum, melek politik, kritis terhadap informasi, menghargai perbedaan politik, dan mampu berpartisipasi secara sehat dalam kehidupan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Y. Ada, D. Generasi, M. Aditya, H. Anwar, and M. F. Ramadan, "Pengaruh Media Sosial Di Era Digital Terhadap Nilai Toleransi yang ada Dikalangan Generasi Muda," *JIMMI J. Ilm. Mhs. Multidisiplin*, vol. 3, no. 1, pp. 203–216, 2026.

[2] R. J. Silaban, S. Mehlika, A. Haq, A. Al Munna, and Y. Achdiani, "Penggunaan Media Sosial dalam Mengatasi Stres Akademik pada Mahasiswa: Studi Fenomenologi 'ALFRED SCHUTZ,'" *J. Sos. Hum. dan Pendidik.*, vol. 6, no. 2, pp. 1–14, 2026.

[3] M. Ridwan, I. Dianto, and M. Rafiq, "Peran Media Online dalam Meningkkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024," *Al-Zayn J. Ilmu Sos. Huk.*, vol. 4, no. 3, pp. 6901–6917, 2026.

[4] I. M. Farikiansyah, M. N. Salamah, A. Rokhimah, and L. Ma, "Meningkatkan Partisipasi Pemilu melalui Literasi Politik Pemuda Milenial dalam Pendidikan Kewarganegaraan," *J. Educ. Res.*, vol. 5, no. 4, pp. 6512–6523, 2024.

[5] V. Nabila, Z. F. Nurhadi, and A. W. Kurniawan, "Pengaruh Media Sosial Instagram terhadap Literasi Politik Gen Z pada Pilkada 2024 di Kabupaten Garut," *J. Communio J. Jur. Ilmu Komun.*, vol. 14, no. 2, pp. 269–285, 2025.

[6] F. Amrullah, K. D. Dwivayani, and J. A. Wikandana, "Literasi Politik Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula di Kota Samarinda," *J. Komun. Adm. Publik*, vol. 12, no. 1, pp. 379–390, 2025.

[7] S. Al Hamid and U. Hamim, "Sosialisasi Literasi Politik dalam Menyongsong Pemilu 2024 Terhadap Pemilih Pemula di SMA Negeri 1 Bolangitang Timur," *J. Pengabdi. Pedagog.*, vol. 1, no. 2, pp. 67–78, 2024.

[8] A. Nurhopipah and P. Arsi, "Indeks Literasi Digital Kader TP PKK," *J. Komun. Glob.*, vol. 13, no. 1, pp. 126–149, 2024.

[9] W. B. Pudjianto *et al.*, *Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2025*. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Ministry, 2025.

[10] A. Prayugo and R. B. Prayitno, "Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan," *EDUKASIA J. Pendidik. dan Pembelajaran*, vol. 3, no. 3, pp. 427–442, 2022.

[11] B. Hermanto *et al.*, "Pendidikan Politik Bagi Siswa SMA Negeri 2 Brebes Sebagai Upaya Peningkatan Angka Partisipasi Pemilih Generasi Muda di Kabupaten Brebes," *J. Pengabdi. Masy. Bangsa*, vol. 3, no. 7, pp. 3683–3694, 2025.

[12] Z. Rahmadani, M. Nurahmi, H. Ramadani, and D. Ramadani, "Peran Literasi Digital dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda di Media Sosial," *J. Literasi Digit.*, vol. 5, no. 3, pp. 232–241, 2025.

[13] A. F. Pratama, R. Juwandi, and F. A. Bahrudin, "Pengaruh Literasi Politik dan Informasi Hoax terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa," *J. Civix Educ.*, vol. 5, no. 1, pp. 12–24, 2022.

[14] E. Prihantoro, W. Widyaningsih, and W. R. Ramadhani, "Pengaruh Terpaan Meme Politik, Kualitas Informasi, dan Literasi Digital Terhadap Sikap Pemilih Pemula di Jabodetabek," *Interak. J. Ilmu Komun.*, vol. 13, no. 2, pp. 351–371, 2024.

[15] R. Ardianti, Y. P. Monique, R. A. Eka, S. Handayani, and L. Humairah, "#KaburAjaDulu: Affective Digital Activism among Indonesian Youth in Response to Societal and Structural Crises," *J. Sos. Hum. dan Pendidik.*, vol. 5, no. 2, pp. 137–151, 2025.